



## BAB 4

---

# BANGKIT DAN OPTIMIS: SINERGI DAN INOVASI UNTUK PEMULIHAN EKONOMI

Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian pada 2021 menjadi dasar untuk bangkit dan semakin optimis akan percepatan proses pemulihan ekonomi Indonesia pada 2022. Upaya pemulihan ekonomi tetap didasarkan pada kerangka sinergi kebijakan agar ekonomi kembali ke lintasan jangka panjangnya. Prospek ekonomi Indonesia pada 2022 akan semakin membaik sejalan dengan prakiraan peningkatan kinerja permintaan domestik dan perekonomian global. Stabilitas perekonomian diperkirakan tetap terjaga di tengah proses pemulihan perekonomian yang terus berlangsung. Prospek positif tersebut diperkuat dengan sinergi dan inovasi untuk menjaga momentum kebangkitan dan membangun optimisme pemulihan perekonomian nasional. Sinergi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), perbankan, dan dunia usaha akan terus diperkuat untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional yang berkesinambungan. Inovasi bauran kebijakan senantiasa diselaraskan dengan perkembangan kondisi global, domestik, serta kebijakan fiskal untuk mendukung berlanjutnya reformasi struktural perekonomian nasional sehingga dalam jangka menengah perekonomian terus meningkat dan kembali berada di lintasan menuju Indonesia Maju.

Akselerasi pemulihan ekonomi nasional terus didorong melalui penguatan sinergi dan inovasi yang dilandasi oleh semangat kuat untuk bangkit dan optimis. Upaya pemulihan ekonomi didasarkan pada kerangka sinergi dan inovasi kebijakan dengan memperkuat satu kebijakan prasyarat (*necessary*) dan mempercepat lima respons kebijakan yang diperlukan (*sufficient*) agar ekonomi kembali ke lintasan jangka panjangnya. Sinergi kebijakan untuk akselerasi vaksinasi dan penanganan Covid-19 dengan pembukaan sektor-sektor ekonomi prioritas sangat diperlukan sebagai kebijakan prasyarat untuk mendorong berlanjutnya proses pemulihan ekonomi nasional. Prasyarat tersebut perlu ditunjang oleh 5 (lima) respons kebijakan, yaitu: (i) akselerasi

---

**"Sinergi kebijakan yang erat pada 2021 menjadi dasar untuk bangkit dan semakin optimis akan proses pemulihan ekonomi yang lebih baik pada 2022"**

---

transformasi sektor riil, (ii) sinergi stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial dengan kebijakan fiskal, (iii) akselerasi transformasi sektor keuangan, (iv) digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta (v) ekonomi dan keuangan hijau.



4.1

## Satu Prasyarat, Lima Respons Kebijakan

Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian pada 2021 menjadi dasar untuk bangkit dan semakin optimis akan proses pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada 2022. Akselerasi pemulihan ekonomi nasional terus didorong melalui penguatan sinergi dan inovasi yang dilandasi oleh semangat kuat untuk bangkit dan optimis. Sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan imunitas massal dari pandemi Covid-19 dan pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan dengan tetap menjaga stabilitas, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui kebijakan reformasi struktural.

Upaya pemulihan ekonomi tetap didasarkan pada kerangka sinergi kebijakan, yaitu perlunya memperkuat satu kebijakan prasyarat (*necessary*) dan mempercepat lima respons kebijakan yang diperlukan (*sufficient*) agar ekonomi kembali ke lintasan jangka panjangnya. Sinergi kebijakan untuk akselerasi vaksinasi dan penanganan Covid-19

dengan pembukaan sektor-sektor ekonomi prioritas sangat diperlukan sebagai kebijakan prasyarat untuk mendorong berlanjutnya proses pemulihan ekonomi nasional. Prasyarat tersebut perlu ditunjang oleh 5 (lima) respons kebijakan, yaitu: (i) akselerasi transformasi sektor riil, (ii) sinergi stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial dengan kebijakan fiskal, (iii) akselerasi transformasi sektor keuangan, (iv) digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta (v) ekonomi dan keuangan hijau (Gambar 4.1). Penguatan sinergi dan inovasi tersebut akan membangun optimisme akselerasi pemulihan ekonomi nasional 2022 dan tahun-tahun berikutnya, serta peningkatan laju pertumbuhan pada jangka menengah-panjang menuju Indonesia Maju 2045.

Sinergi akselerasi vaksinasi dan pembukaan sektor prioritas menjadi prasyarat bagi keberlanjutan proses pemulihan ekonomi nasional. Pelajaran berharga dari tahun 2021 adalah bahwa respons kebijakan yang cepat dan terukur melalui sinergi akselerasi vaksinasi dan penanganan Covid-19 serta pembukaan sektor prioritas menjadi penentu bagi pemulihan ekonomi.

Gambar 4.1. Sinergi Kebijakan Nasional



Sumber: Bank Indonesia

Kebijakan akselerasi vaksinasi dan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditempuh Pemerintah dapat menahan mengendalikan penyebaran Covid-19 dalam jangka waktu yang relatif singkat. Setelah mengalami lonjakan signifikan pada Juni-Juli 2021, penurunan kasus baru harian Covid-19 terus menunjukkan penurunan sejak Agustus 2021. Sejalan dengan itu, Pemerintah merencanakan untuk mulai membuka secara bertahap sektor-sektor dan/atau wilayah-wilayah dengan kasus berat rendah, angka pemanfaatan rumah sakit yang juga rendah, dan tingkat kematian yang rendah. Tahapan pembukaan sektor-sektor ekonomi dilakukan secara bertahap, dari persiapan, transisi tahap I dan II untuk hidup bersama Covid-19, dengan memerhatikan pula strategi pemenuhan penanganan pandemi yaitu percepatan vaksinasi, peningkatan 3T (*testing, tracing, treatment*), serta penerapan protokol kesehatan dan peduli lindungi (Gambar 4.2). Ke depan, program vaksinasi perlu terus dipercepat untuk mencapai tingkat kekebalan yang diperlukan, sehingga memperkuat ketahanan terhadap kemungkinan penyebaran varian baru Covid-19, juga untuk memastikan keberlanjutan proses perbaikan ekonomi nasional. Hal ini menegaskan kembali pentingnya

sinergi akselerasi vaksinasi dan pembukaan sektor prioritas sebagai prasyarat bagi pemulihan ekonomi serta dampak rambatannya pada sektor keuangan dan moneter. Pada gilirannya, pemenuhan prasyarat tersebut akan menjadi penguat optimisme pemulihan ekonomi ke depan.

**Upaya Pemerintah untuk mengakselerasi vaksinasi serta mendukung penanganan kesehatan dan kemanusiaan akibat pandemi Covid-19 didukung secara penuh oleh Bank Indonesia, termasuk melalui partisipasi dalam pendanaan APBN.** Virus Covid-19 varian Delta yang merebak dengan cepat pada Juni-Agustus 2021 berdampak pada lonjakan kasus positif dan bahkan kematian. Pada saat yang bersamaan, ketersediaan pasokan, kapasitas, dan distribusi vaksin, serta kemampuan rumah sakit, tenaga medis, dan kebutuhan perawatan sangat terbatas dan memerlukan biaya yang sangat besar. Untuk itu, Bank Indonesia berpartisipasi dalam langkah-langkah bersama untuk penanganan kesehatan dan penyelamatan kemanusiaan akibat Covid-19. Bank Indonesia berinisiatif untuk mendukung pendanaan APBN 2021 dan 2022 melalui pembelian SBN dari pasar perdana secara langsung (*private placement*)

**Gambar 4.2. Rancangan Persiapan ke Kenormalan Baru, Hidup Bersama Endemi**



Sumber: Paparan Evaluasi PPKM, Kemenkomarves, Studi Australia dan Singapura

sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 23 Agustus 2021. Pembelian SBN secara langsung oleh Bank Indonesia untuk seluruh biaya kesehatan dalam APBN pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar Rp215 triliun dan Rp224 triliun. Pembelian ini disertai dengan biaya suku bunga yang sangat rendah, yaitu sebesar biaya operasi moneter (*Bank Indonesia Reverse Repo Rate* tenor 3 bulan). Partisipasi Bank Indonesia diwujudkan melalui kontribusi atas seluruh biaya bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan batas maksimum Rp58 triliun (2021) dan Rp40 triliun (2022), sesuai kemampuan keuangan Bank Indonesia. Dengan tambahan pendanaan biaya kesehatan oleh Bank Indonesia pada APBN 2021 dan 2022 tersebut, Pemerintah dapat menangani Covid-19 varian Delta dengan sangat cepat. Pemerintah juga dapat semakin mempercepat vaksinasi untuk mencapai imunitas massal, sehingga meningkatkan ketahanan atas kemungkinan penyebaran varian virus baru. Hal ini penting untuk dilakukan agar langkah-langkah pembukaan sektor-sektor dan berbagai aktivitas ekonomi dapat terus dilakukan dengan mitigasi risiko pandemi Covid-19 yang memadai.

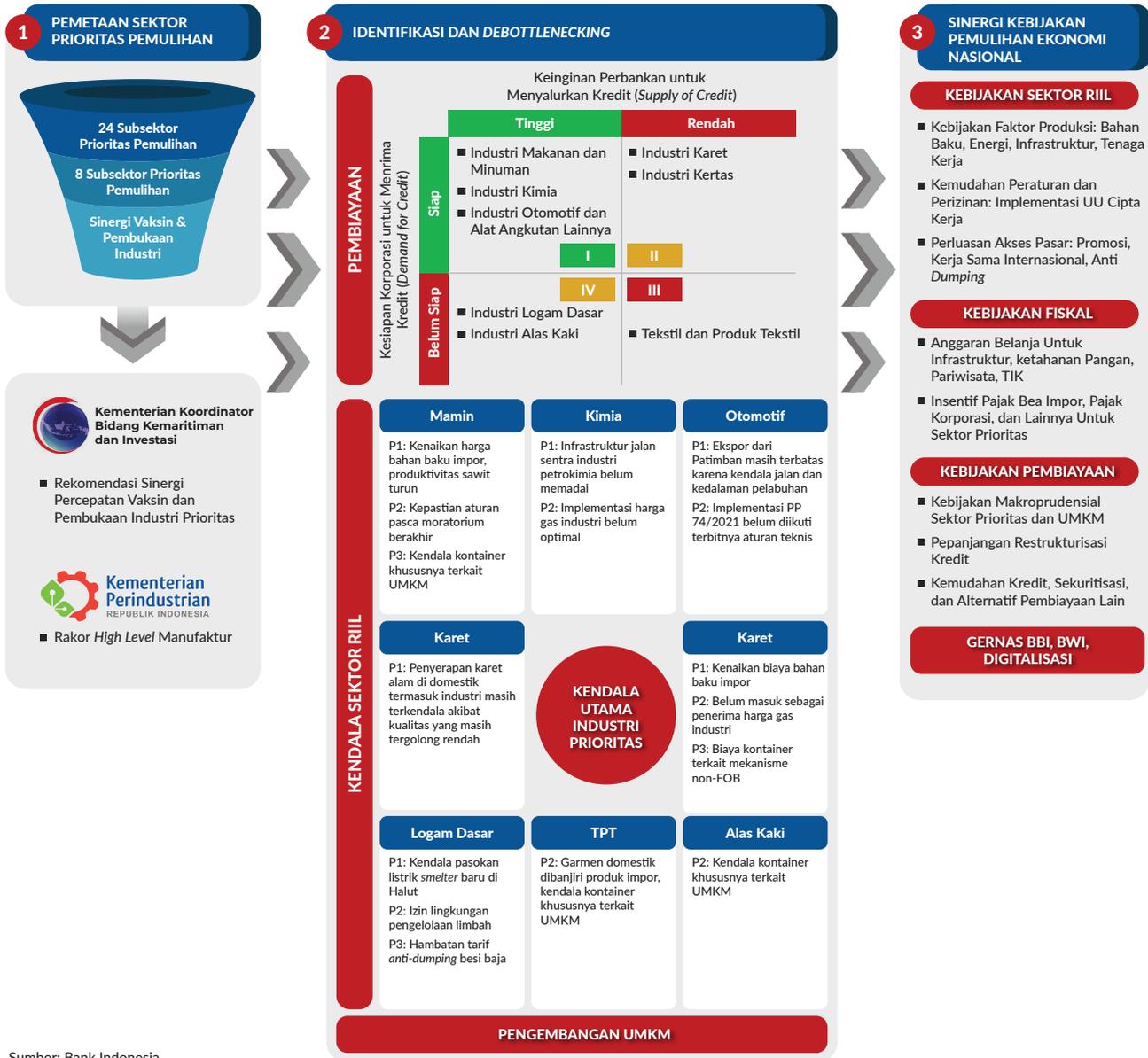
**Sejalan dengan akselerasi vaksinasi untuk mencapai imunitas massal, respons kebijakan ekonomi nasional yang pertama perlu difokuskan adalah pada pemulihan sektor-sektor prioritas secara cepat agar mampu mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Sinergi dan inovasi kebijakan sangat**

penting untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, baik pemecahan berbagai kendala (*debottlenecking*) dari sisi sektor riil, pemberian insentif kebijakan fiskal, maupun dukungan kebijakan makroprudensial dan sektor keuangan yang diperlukan. Pendekatan ini telah dimulai oleh KSSK melalui sinergi kebijakan untuk pemulihan sektor properti dan otomotif sebelum merebaknya varian Covid-19 varian Delta. Proses ini dilakukan melalui 3 tahapan.

*Pertama*, pemetaan sektor-sektor prioritas yang mampu berdaya tahan, pendorong pertumbuhan, serta penopang pemulihan ekonomi. Dalam kaitan ini, terdapat 8 (delapan) subsektor prioritas utama yang dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan ekspor yaitu: (1) Industri Makanan dan Minuman; (2) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki; (3) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; (4) Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional; (5) Industri Kertas dan Barang dari Kertas; (6) Industri Logam Dasar; (7) Industri Alat Angkutan; serta (8) Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik (Gambar 4.3). Dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sesuai dengan sentra produksi dan kondisi pembatasan mobilitas (PPKM) di sentra industri-industri tersebut, diperoleh rumusan strategi pembukaan wilayah sentra produksi untuk mendukung aktivitas industri di tengah PPKM, namun dengan tetap mempertimbangkan risiko dari penyebaran Covid-19. Hasil pemetaan tersebut menjadi salah satu dasar rekomendasi kebijakan, yaitu pembukaan industri yang diselaraskan dengan akselerasi vaksinasi.



Gambar 4.3. Sinergi Kebijakan Ekonomi Nasional untuk Akselerasi Pemulihan Sektor Prioritas



Sumber: Bank Indonesia

Usulan tersebut menjadi salah satu rekomendasi kebijakan yang disampaikan dalam forum koordinasi bersama Kementerian Perindustrian melalui Rapat Koordinasi High Level Manufaktur secara bilateral pada 8 Oktober 2021. Dalam rapat tersebut, kedua lembaga menyepakati strategi kebijakan pemulihan dan penguatan struktur industri manufaktur yang akan ditindaklanjuti melalui serangkaian kegiatan kerja sama pada 2022. Di samping sektor industri tersebut, pengembangan UMKM perlu terus menjadi prioritas karena kontribusinya yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, maupun untuk inklusi ekonomi dan keuangan.

Kedua, identifikasi kendala yang dihadapi dalam pemulihan sektor-sektor prioritas tersebut, baik kendala di sektor riil maupun dari sisi pembiayaan. Untuk itu, perlu dilakukan pembahasan bersama melalui forum koordinasi, yakni antara Pemerintah Pusat (K/L terkait), KSSK, pelaku industri, perbankan, serta Pemerintah Daerah terkait. Berbagai permasalahan pada sektor riil baik berkaitan aspek perbaikan faktor produksi seperti bahan baku, energi dan tenaga kerja, aspek pengaturan dan kelembagaan khususnya kejelasan kebijakan dan kemudian perizinan, maupun aspek promosi dan akses pasar di dalam negeri dan luar negeri. Pada aspek pembiayaan, permasalahan dapat berasal dari perusahaan atau

perbankan. Sejumlah sektor, khususnya yang berorientasi ekspor telah tumbuh, dan penyaluran kredit telah meningkat. Namun, untuk sektor-sektor lainnya perlu respons kebijakan baik dari sisi permintaan kredit dari sektor riil maupun untuk mengatasi persepsi risiko kredit dari perbankan.

Ketiga, sinergi dan koordinasi kebijakan ekonomi nasional perlu dirumuskan dan diimplementasikan sesuai kondisi pada masing-masing sektor produktif dimaksud. Secara keseluruhan, kebijakan yang diperlukan meliputi kebijakan terkait sektor riil, kebijakan fiskal, maupun kebijakan pembiayaan. Dari sisi sektor riil, kebijakan terkait faktor produksi seperti bahan baku, energi, infrastruktur, dan tenaga kerja; kebijakan kemudahan peraturan dan perizinan, termasuk implementasi UU Cipta Kerja; serta kebijakan perluasan akses pasar seperti promosi dan kerja sama internasional. Di bidang fiskal, kebijakan menyangkut alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, TIK, maupun insentif pajak bea impor, pajak korporasi, dan lainnya untuk sektor prioritas. Dari sisi pembiayaan, kebijakan menyangkut kebijakan makroprudensial

sektor prioritas dan UMKM dari Bank Indonesia, kebijakan perpanjangan restrukturisasi kredit dari OJK, serta kemudahan kredit perbankan, sekuritisasi, dan alternatif pembiayaan lain.

**Respons kebijakan kedua untuk pemulihan ekonomi nasional berkaitan dengan sinergi kebijakan fiskal Pemerintah dengan stimulus moneter dan makroprudensial dari Bank Indonesia untuk mendorong permintaan, khususnya dalam jangka pendek.** Stimulus fiskal dalam jumlah yang relatif besar akan mendukung proses pemulihan ekonomi nasional. Dalam rangka menstimulasi perekonomian dan mencapai target pembangunan, postur APBN 2022 terdiri dari pendapatan negara yang direncanakan sebesar Rp1.846,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.714,2 triliun, sehingga defisit APBN sebesar Rp868 triliun atau 4,85% PDB. Sebagian besar anggaran, yaitu sebesar Rp1.711,5 triliun 63%-nya dialokasikan untuk program strategis APBN 2022 dalam mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju (Gambar 4.4). Sementara, Bank Indonesia memperkuat perannya dalam pendanaan APBN 2021

**Gambar 4.4. Stimulus Fiskal**



Sumber: Kementerian Keuangan

dan 2022 disertai partisipasi berupa kontribusi atas seluruh biaya bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan batas yang diperhitungkan sesuai kemampuan keuangan Bank Indonesia. Dengan sinergi tersebut, Pemerintah dapat lebih fokus pada upaya akselerasi realisasi APBN tahun 2021 dan 2022 untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan makroprudensial akomodatif juga dilanjutkan untuk tetap mendorong fungsi intermediasi antara lain melalui rasio *countercyclical capital buffer* (CCyB), rasio intermediasi makroprudensial (RIM), dan rasio *loan to value* (LTV) atau uang muka yang kondusif bagi intermediasi, termasuk mendorong sektor prioritas, ekspor, dan inklusi.

**Respons kebijakan ketiga untuk pemulihan menyangkut aspek peningkatan dan kemudahan pembiayaan dari sektor keuangan kepada dunia usaha.** Dalam jangka pendek, kebijakan untuk mendorong penyaluran kredit perbankan diperlukan dengan mengatasi permasalahan, baik dari sisi penawaran kredit oleh perbankan maupun sisi permintaan kredit dari dunia usaha. Pemetaan sektor-sektor prioritas di atas sangat penting untuk memahami faktor mana yang lebih dominan dan respons kebijakan yang diperlukan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan dapat berasal dari permintaan kredit perusahaan atau penawaran kredit perbankan. Untuk industri makanan minuman, kimia, otomotif, dan alat angkut lainnya, penyaluran kredit telah meningkat karena permintaan dari korporasi dan perbankan juga siap membiayainya. Sementara pada sektor-sektor lainnya, perlu insentif untuk mendorong kredit, baik insentif pada sektor riil agar prospek bisnis lebih baik maupun insentif kepada perbankan dalam bentuk jaminan kredit atau insentif suku bunga.

**Selain kredit perbankan, pembiayaan dari pasar modal juga semakin diperlukan, baik melalui penerbitan saham maupun obligasi korporasi.** Penerbitan sekuritas berbasis aset (*asset backed securities*) maupun berbasis penerimaan (*earning*

*backed securities*) juga perlu semakin dikembangkan. Dalam kaitan ini, peran Indonesia *Investment Authorities* (INA) sangat diperlukan sebagai pionir dalam sekuritisasi aset maupun pendapatan dari proyek-proyek infrastruktur yang telah beroperasi secara baik dengan kondisi keuangan perusahaan yang menjanjikan. Selain itu, pengembangan pasar uang dan pasar valas oleh Bank Indonesia sesuai BPPU 2025 juga berperan penting, baik dalam penerbitan sekuritas jangka pendek seperti Surat Berharga Komersial (SBK), perluasan transaksi repo, maupun penyediaan instrumen lindung nilai. Instrumen lindung nilai baik nilai tukar Rupiah seperti DNDF maupun lindung nilai suku bunga seperti *Interest Rate Swap* (IRS). Transformasi pasar keuangan sangat diperlukan untuk semakin memperluas alternatif pembiayaan kepada dunia usaha dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

**Respons kebijakan keempat diarahkan untuk akselerasi digitalisasi serta inklusi ekonomi dan keuangan nasional.** Keberhasilan berbagai sinergi kebijakan pada 2020 dan 2021 perlu terus ditingkatkan dan diperluas. Untuk mendorong inklusi ekonomi dan keuangan nasional, Gernas BBI dan BWI telah meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian, antara lain peningkatan transaksi UMKM melalui program belanja produk-produk UMKM dan perluasan penggunaan QRIS UMKM. Bank Indonesia secara konsisten mendukung Gernas BBI dan BWI tersebut, baik melalui sinergi yang erat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah maupun dengan dunia usaha. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan berbagai kegiatan bersama setiap bulan di berbagai daerah, termasuk *event* strategis yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, seperti pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) setiap tahunnya. Peran strategis Bank Indonesia dalam mendukung pelaksanaan Gernas BBI dan BWI dikukuhkan melalui penerbitan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Keputusan tersebut menetapkan Gubernur Bank Indonesia sebagai Wakil Ketua bersama Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menunjukkan bukti dan apresiasi Pemerintah terhadap peran aktif Bank Indonesia dalam mendukung kesuksesan Gernas BBI dan BWI. Komitmen kuat dari Bank Indonesia untuk inklusi ekonomi dan keuangan juga dilakukan melalui akselerasi digitalisasi sistem pembayaran sesuai *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 untuk integrasi dan penguatan EKD nasional yang efisien dan inklusif. Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran juga diarahkan untuk mendukung program Pemerintah melalui elektronifikasi penyaluran program perlindungan sosial, berbagai moda transportasi maupun elektronifikasi keuangan Pemerintah Daerah.

**Respons kebijakan kelima terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan hijau untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.**

Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim menimbulkan risiko fisik dan risiko transisi yang berimplikasi pada stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan. Transisi menuju ekonomi hijau,

yakni ekonomi rendah karbon, perlu dilakukan secara gradual dan moderat, untuk optimalisasi respons kebijakan akibat perubahan iklim. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan keuangan hijau guna mendorong terciptanya sistem keuangan yang berkelanjutan, melalui koordinasi erat dengan otoritas terkait serta keterlibatan aktif dalam berbagai forum internasional yang berfokus dalam keuangan hijau. Bank Indonesia telah menempuh beragam langkah inisiatif, baik dalam bentuk kebijakan hingga penerapan prinsip investasi berkelanjutan dalam alokasi portofolio cadangan devisa, sejalan dengan semakin menguatnya kebijakan keuangan global yang mengarah kepada prinsip berkelanjutan. Selain itu, Bank Indonesia mendukung transformasi menuju sistem keuangan hijau, sehingga dapat mendorong kontribusi sektor keuangan domestik dalam penurunan emisi karbon. Inisiatif tersebut dilakukan untuk mendukung tercapainya target penurunan emisi karbon Indonesia sebagaimana semangat dari *Paris Agreement* yang ditandatangani oleh Pemerintah berbagai negara untuk membatasi kenaikan suhu global bumi.

## 4.2

## Sinergi Kebijakan Ekonomi Nasional

Sinergi kebijakan yang semakin erat sejak awal pandemi dan kinerja perekonomian yang membaik menjadi dasar untuk bangkit dan semakin optimis akan proses pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun 2022. Akselerasi pemulihan ekonomi nasional terus didorong melalui dukungan sinergi dan inovasi kebijakan nasional yang dilandasi oleh semangat kuat untuk bangkit dan optimis. Sinergi dan inovasi kebijakan nasional diarahkan untuk meningkatkan imunitas massal sebagai upaya untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 yang diiringi dengan pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan dengan tetap menjaga stabilitas, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui kebijakan reformasi struktural. Rangkaian kebijakan tersebut diperkuat dengan penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan nasional yang sudah berjalan dengan baik dan berdampak positif terhadap perekonomian.

**Sinergi kebijakan nasional akan terus diperkuat antara Bank Indonesia, Pemerintah, serta pemangku kebijakan di berbagai sektor untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi serta menjaga stabilitas.** Pencapaian positif pada 2021 dalam penanganan Covid-19 dan proses pemulihan ekonomi menunjukkan hasil sinergi kebijakan nasional yang baik. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia, Pemerintah, OJK, LPS, dan lembaga terkait perlu dipertahankan dan diperkuat mengingat pandemi belum berakhir. Selain ketidakpastian dari faktor pandemi, berbagai tantangan dari sisi global maupun domestik perlu diwaspadai dan diantisipasi dengan baik.

**Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS dalam forum KSSK berkomitmen untuk memperkuat sinergi dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.** Bank Indonesia terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan baik dari sisi moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran untuk

menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut. Pemerintah melalui optimalisasi instrumen belanja negara berupaya untuk mengatasi pandemi, memberikan perlindungan sosial, dan mempercepat pemulihan ekonomi. Sebagai bagian dari sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah, Bank Indonesia melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN dengan mengacu pada UU No. 2 tahun 2020. OJK terus mendorong transformasi digital sektor jasa keuangan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Transformasi difokuskan pada pemberian layanan/ produk yang cepat, mudah, murah, dan kompetitif kepada masyarakat serta peningkatan kemudahan dan perluasan akses masyarakat *unbankable* dan UMKM. LPS kembali menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional. Penurunan TBP diharapkan akan mendorong penurunan suku bunga simpanan, yang selanjutnya dapat menurunkan suku bunga kredit. Koordinasi dalam forum KSSK terus dipererat untuk mengantisipasi berbagai risiko bagi stabilitas sistem keuangan dan memperkuat upaya percepatan pemulihan ekonomi. Selain itu koordinasi sinergi kebijakan antara KSSK dengan kementerian/ lembaga terkait penguatan dukungan bagi sektor usaha untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi juga terus dilakukan.

**Dalam menjaga stabilitas harga, telah disusun Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 sebagai pedoman dalam kebijakan pengendalian inflasi ke depan.** Pemerintah bersama Bank Indonesia telah menetapkan sasaran inflasi yang rendah dengan tren menurun dan sesuai dengan tingkat inflasi yang mendukung upaya peningkatan pertumbuhan yang berkelanjutan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 telah menetapkan sasaran inflasi pada periode 2022-2024 berturut-turut sebesar  $3,0\% \pm 1,0\%$ ,  $3,0\% \pm 1,0\%$ , dan  $2,5\% \pm 1,0\%$ . Untuk mencapai target tersebut telah disusun Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 yang sejalan dengan arahan Presiden pada

Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2021. Arahan yang diperoleh dari rapat tersebut mencakup peningkatan produktivitas petani dan nelayan, penguatan sektor UMKM agar mampu bertahan dan naik kelas, serta peningkatan nilai tambah sektor pertanian sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Perkembangan teknologi, penggunaan internet, *e-commerce*, dan platform digital yang meningkat signifikan selama masa pandemi dapat dimanfaatkan untuk mengintegrasikan pengembangan ekosistem sektor pertanian dari sisi hulu hingga hilir melalui adopsi teknologi.

**Peta Jalan Pengendalian Inflasi juga digunakan sebagai panduan dan rekomendasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam Peta Jalan TPID 2022- 2024.** Namun demikian, tantangan yang dihadapi dan kapabilitas yang dimiliki oleh setiap daerah dalam pengendalian inflasi daerah dapat berbeda-beda. Untuk itu, penyusunan panduan pengendalian inflasi daerah selain mengacu pada upaya di tingkat nasional, juga perlu mempertimbangkan konteks dan permasalahan inflasi di masing-masing daerah. Dalam rangka penguatan upaya pengendalian inflasi di daerah, diperlukan peningkatan peran dan kapabilitas daerah melalui forum TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Upaya peningkatan keandalan TPID melalui pembinaan, *capacity building* dan sosialisasi dapat dilakukan secara berlanjut untuk terus memperkuat kelembagaan TPID. Evaluasi kinerja TPID dilakukan dengan menggunakan dua aspek pendekatan, yakni aspek tujuan (*outcome*) yang diukur dari hasil capaian tingkat inflasi daerah dibandingkan targetnya, serta aspek proses yang diukur dari capaian program kerja di setiap daerah. Dalam program kerja ini, Bank Indonesia bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri menetapkan target yang akan dicapai pada tahun 2022-2024.

**Untuk menjaga ekspektasi inflasi, pelaksanaan bauran kebijakan yang kredibel diperkuat dengan komunikasi yang rutin dan terpercaya.** Upaya pengendalian inflasi tidak lepas dari pelaksanaan bauran kebijakan termasuk pengendalian inflasi yang kredibel dan komunikasi yang dilakukan secara efektif dan berkesinambungan. Dalam hal ini, berbagai upaya komunikasi kebijakan akan dilakukan

secara rutin dan terus diperkuat antara lain melalui publikasi *press release*, *press conference*, maupun upaya strategi komunikasi lainnya melalui berbagai media/jalur komunikasi. Melalui upaya ini, ekspektasi inflasi masyarakat diharapkan dapat terjaga di tengah dinamika perekonomian global maupun domestik.

**Di bidang sistem pembayaran, sinergi kebijakan ekonomi keuangan digital dan elektronifikasi dengan berbagai pihak terus dilanjutkan dan diperkuat.**

Penguatan sinergi dan koordinasi dilakukan Bank Indonesia dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah), perbankan, dan asosiasi baik sistem pembayaran, *fintech* dan *e-commerce* a.l. melalui Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), dan *Fintech Summit*. Sinergi dan koordinasi terutama diarahkan untuk perluasan elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah, sinergi kebijakan digitalisasi sistem pembayaran (SP) dan digitalisasi lembaga keuangan, serta perluasan program digitalisasi SP yang sudah berjalan, seperti QRIS, SNAP, dan BI-FAST, maupun perluasan layanan kepada masyarakat luas.

**Bank Indonesia terus mendorong pemanfaatan teknologi, inovasi produk dan saluran distribusi dalam rangka meningkatkan elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda).**

Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan keuangan inklusif yang terarah, efisien dan sinergis. Program ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan meningkatkan potensi penerimaan Pemda, diantaranya dengan pembentukan Tim Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di daerah dan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP). Upaya perluasan ETP didukung oleh payung hukum dan penguatan kelembagaan. Telah diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) RI No.3 Tahun 2021 tentang Satgas P2DD pada 5 Maret 2021. Keppres ini mewajibkan seluruh Pemda membentuk TP2DD paling lambat satu tahun sejak Keppres tersebut diterbitkan. Hingga 15 November 2021, sebanyak 521 Pemda di Indonesia telah membentuk TP2DD. Sebagai peraturan pelaksana, telah diterbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) No.147 Tahun 2021 tentang Keanggotaan, Tugas, dan Mekanisme Kerja Pelaksana dan Sekretariat Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah pada tanggal 2 Juni 2021. Penerbitan ketentuan

tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah serta menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas Satgas P2DD baik pada level nasional, provinsi, maupun kabupaten dan kota.

**Bank Indonesia mendukung program bantuan sosial Pemerintah (PKH dan Program Sembako) melalui fasilitasi penggunaan instrumen pembayaran nontunai.** Hingga akhir Oktober 2021, telah disalurkan bansos PKH sebesar Rp20,79 triliun (72,40% dari target) dan Rp30,87 triliun (61,87% dari target) untuk Program Sembako. Selain itu, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah melalui dukungan atas pelaksanaan uji coba digitalisasi bansos untuk mendorong realisasi belanja pemerintah yang telah diluncurkan pada tanggal 21 November 2021.

**Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam elektronifikasi pembayaran pada sektor transportasi.** Koordinasi fasilitasi elektronifikasi transportasi dilakukan Bank Indonesia bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait di sejumlah daerah pada beberapa moda transportasi. Koordinasi tersebut meliputi akselerasi implementasi *Security Access Module (SAM) Multiapplet* pada moda

transportasi di Jakarta dan sekitarnya, integrasi moda transportasi, elektronifikasi pembayaran Bus Rapid Transit (BRT), perluasan elektronifikasi pembayaran perparkiran bandara, implementasi SAM Multiapplet serta perluasan elektronifikasi pembayaran perparkiran *on-street* secara daring, dan uji interoperabilitas menggunakan SAM Multiapplet pada program transportasi nasional *Buy The Service (BTS)* di sejumlah kota dengan Kementerian Perhubungan. Bank Indonesia juga mendukung integrasi pembayaran moda transportasi di Jabodetabek. Dukungan tersebut dilakukan melalui fasilitasi upaya elektronifikasi pembayaran moda transportasi yang terintegrasi. Pada triwulan III 2021 telah dilakukan uji coba terbatas fase 1 yaitu uji aplikasi keseluruhan pada *gate* tertentu. Bank Indonesia terus melakukan fasilitasi dalam rangka implementasi elektronifikasi di jalan tol. Pada triwulan III 2021, Bank Indonesia melakukan fasilitasi perluasan elektronifikasi di jalan tol dalam rangka pembukaan ruas jalan tol baru. Bank Indonesia secara berkesinambungan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Badan Pengatur Jalan Tol (KemenPUPR - BPJT) dan Badan Usaha Pelaksana (BUP) yang ditunjuk untuk melakukan persiapan implementasi jalan tol menggunakan teknologi nirsentuh dengan *Multi Lane Free Flow (MLFF)*.

